

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status
2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertifikat
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Fotokopi dokumen perolehan
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau legder jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat;
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

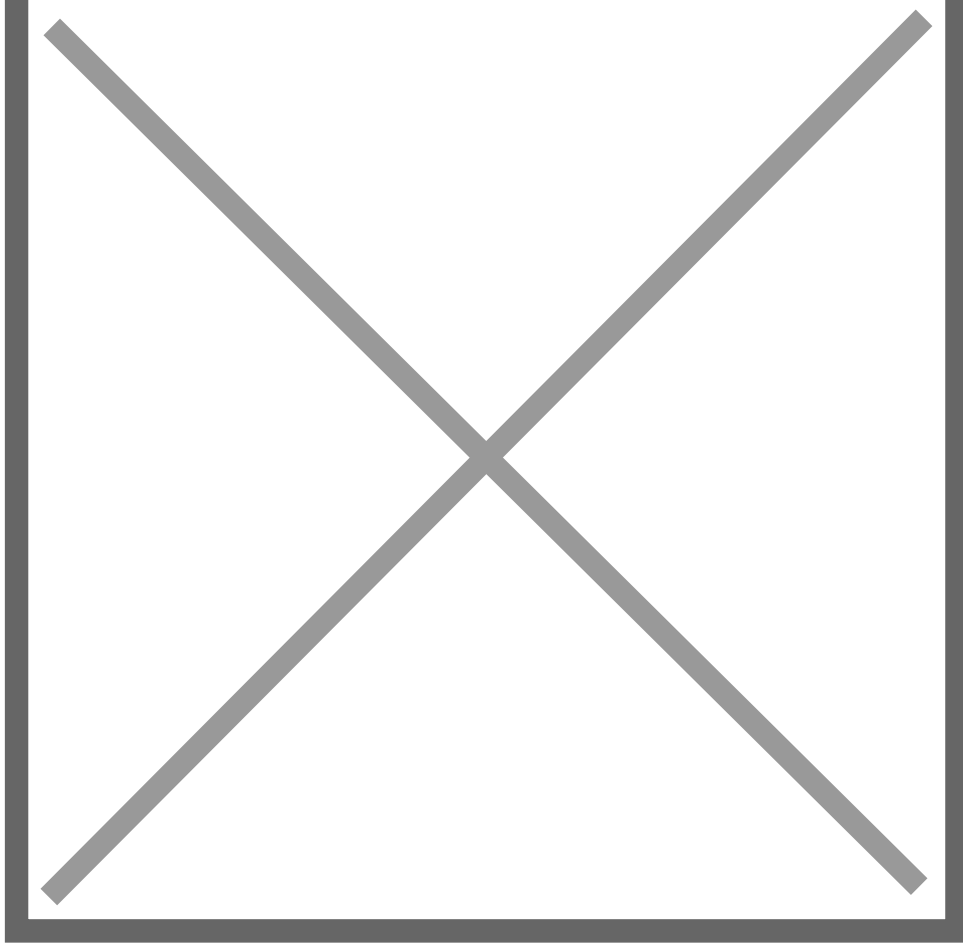
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

Image not found or has expired
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II



1. Pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan atas permohonan penetapan status penggunaan BMN
3. KPKNL menerbitkan Surat keputusan penggunaan BMN dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

3 Hari kerja

Semula 5 (lima) hari kerja, menjadi 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMN.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan

dapat disampaikan melalui:

1. Saluran Internal

a. Call Center HALO DJKN 150-991;

b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id

/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;

c. Surat: ditujukan ke alamat KPKNL

d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada KPKNL;

e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada KPKNL;

f. Saluran lainnya yang telah tersedia di KPKNL;

2. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:

www.wise.kemenkeu.go.id;

3. SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, SMS ke

nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!